



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 978 / Kep. 262 - DISKANAK / 2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA USAHA PENANGKAPAN IKAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan konservasi sumberdaya ikan di perairan darat, pemerintah dapat melakukan program kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam menjalankan program sebagaimana dimaksud pada huruf a pemerintah daerah perlu memberikan bantuan kepada kelompok nelayan/masyarakat dalam bentuk hibah barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok nelayan/masyarakat penerima bantuan hibah dalam Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

3 6 k 7 4 9

- Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 102);



Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 111);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 (Nomor 126);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan;
 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor 500.5.2/89/Bidkankap/III/2026 Tanggal 12 Maret Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelompok Nelayan/Masyarakat Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
 3. Berita Acara Verifikasi penerima bantuan sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor 500.5.2.9/125/BA/Bidkankap/IV/2026 Tanggal 29 April 2026;
 4. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor 500.5.2/252/Bidkankap/IV/2026 Tanggal 30 April 2026 tentang Penetapan Kelompok Nelayan/Masyarakat Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tanggal 30 April Tahun 2026;

3 + 1 1 1 1 1

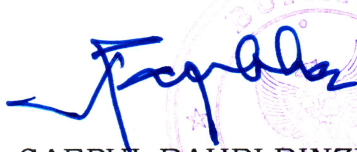
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Nelayan/Masyarakat Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Penangkapan Ikan Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Daftar Kelompok Nelayan/Masyarakat Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA & PENANGGUNG JAWAB		
FAHMI SHIDDIQI, S.Pi	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	
AI SAIDAH, SE, MM	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
H. HELMI SETIAWAN, AP.MM	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	PLT. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M. Kes	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA USAHA
PENANGKAPAN IKAN PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI
WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA,
DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT
DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2026

PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
SARANA DAN PRASARANA USAHA PENANGKAPAN IKAN PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK,
RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

1.	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP (APBD KABUPATEN PURWAKARTA)			
NO	NAMA KELOMPOK NELAYAN/ MASYARAKAT	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	JENIS BANTUAN (JUMLAH)
1.	Melati Putih Jatiluhur	Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur	23 Orang	92 Set Jaring Insang
2.	Ciputat Batu Peti	Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari	20 Orang	80 Set Jaring Insang
3.	Baras Ujung Bendungan	Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari	23 Orang	92 Set Jaring Insang
4.	Asoka Harapan Jaya	Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari	27 Orang	108 Set Jaring Insang
5.	Cahaya Alam Abadi	Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari	34 Orang	136 Set Jaring Insang
6.	Ciririp Liang Meong	Desa Ciririp Kecamatan Sukasari	32 Orang	128 Set Jaring Insang
7.	Astap Jatiluhur Maju	Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani	22 Orang	88 Set Jaring Insang

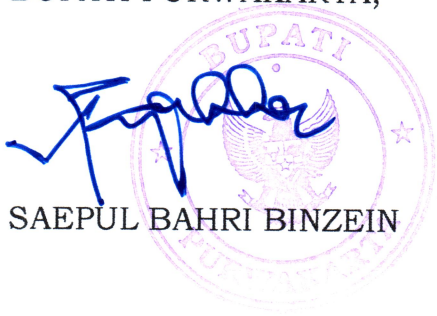
Handwritten signature in blue ink.

8.	Pelacak Nila Putra	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru	22 Orang	88 Set Jaring Insang
9.	Harapan Putra Galumpit	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru	23 Orang	50 Set Jaring Insang
10.	Permata Gabus Alam	Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru	32 Orang	50 Pak Mata Pancing
11.	Sumber Rezeki Citarum	Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru	41 Orang	528 Ikat Kenur Jala

2.	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP (APBD KABUPATEN PURWAKARTA)			
NO	NAMA KELOMPOK NELAYAN/ MASYARAKAT	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	JENIS BANTUAN (JUMLAH)
1.	Pelabuhan Biru Sejahtera	Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur	17 Orang	6 Buah Cooler Box
2.	Harapan Putra Galumpit	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru	23 Orang	6 Buah Cooler Box
3.	Sinar Ikan Sukamukti	Desa Sukamukti Kecamatan Maniis	20 Orang	10 Buah Cooler Box
4.	Tirta Sodong Makmur	Desa Sukamukti Kecamatan Maniis	25 Orang	10 Buah Cooler Box

PARAF PEMRAKARSA & PENANGGUNG JAWAB		
FAHMI SHIDDIQI, S.Pi	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	
AI SAIDAH, SE, MM	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
H. HELMI SETIAWAN, AP.MM	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	PLT. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M. Kes	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN